



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 99);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 99

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Raya Soreang KM. 17 Telp./Fax (022) 85872591 Soreang 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bpbdkabbandung@gmail.com
<http://bpbd-kabbandung.blogspot.com>

SURAT PERINTAH
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 800.1.11.1/655/Sekre
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) adalah merupakan hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumberdaya yang akan digunakan serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya kebencanaan ;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel rencana kerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan RENJA Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, yang terdiri dari ketua tim, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pasal 18 ayat(6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
17. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah;

19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107-Bappelitbangda/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bandung;

KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung bertugas menghimpun bahan-bahan dan menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 23 Mei 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN 1
:

Nomor : 800.1.11.1/655/Sekre
Tanggal : 23 Mei 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
(RENJA) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025

**Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan
Badan penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung
Tahun 2025**

No	Daftar Telampir
1	Drs. H. UKA SUSKA PUJI UTAMA M.Si 196709141995011001 Pembina Utama Muda - IV/c Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembina
2	HENDRA HIDAYAT S.Sos, M.Si 197008251992031007 Pembina - IV/a Sekretaris Bpbd Sekretariat Bpbd Anggota
3	DADAN SH 197205041998031008 Penata Tingkat I - III/d Perencana Ahli Muda Sekretariat Bpbd Anggota
4	BENY SONJAYA SE 197104292008011004 Pembina - IV/a Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
5	DIKI SUDRAJAT S.T., M.Si. 197407122008011005 Penata Tingkat I - III/d Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
6	Hj. DEWI HARTATI S.E., M.Si. 198207152010012010 Penata Tingkat I - III/d Kepala Sub Bagian Subbagian Umum Dan Kepegawaian Anggota
7	DEWI SRI PURWANTI ST 198305072009012006 Penata Tingkat I - III/d Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota

8	ASEP MAHMUD A.Md 197309011994031005 Penata - III/c Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
9	ENDOY SUBANA S.E. 196707092007011006 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
10	BEBEY BAIDILLAH YUSUF A.Md 198003232014121002 198003232014121002 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
11	ISANG ELLY BUDHI RAHAYU S.M. 197203292007011006 Penata Muda - III/a Pengolah Data Dan Informasi Subbagian Umum Dan Kepegawaian Anggota
12	SUMIATI S.E. 199005282019032004 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
13	TAUFIK ABDURRAHMAN A.Md. 199403302024211002 - VII Arsiparis Terampil Sekretariat Bpbd Anggota
14	CECILLE MEITA SUSANTI S.Ak 200105172025052001 Penata Muda - III/a Perencana Ahli Pertama Sekretariat Bpbd Anggota
15	CANDRA PURNAMA A.Md 199101142025211002 - VII Pengelola Layanan Operasional Subbagian Umum Dan Kepegawaian Anggota
16	JAJANG GUNAWAN S.Sos 197810052008011005 Penata Muda Tingkat I - III/b Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
17	HERIYADI S.H. 197607082008011001 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota

18	EVI METI SULISTIOWATI S.Sos 198605132019032003 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
19	ABDUROCHMAN S.Sos. 198910062020121001 Penata Muda Tingkat I - III/b Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
20	KHADAPY NURHUDA S.Sos. 199401272022031009 Penata Muda - III/a Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
21	FELIX PRAMUDITA TEJA S.Psi 198906162023211011 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
22	ARIE SUSILANDARI SKM 198309162024212003 - IX Analisis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
23	RIDWAN MAULANA S.T. 199309032024211003 - XI Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota
24	WAHYU SATIA S.Sos 197709072007011003 Penata - III/c Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
25	SATRIO BUDI PRATAMA S.T. 199402222020121002 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
26	UWOH HIKMAT 197004072009011002 Pengatur Tingkat I - II/d Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
27	RITA SAHARA S.Sos 197210052024212003 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota

28	SUPARTINI S.Sos 197008022024212001 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
29	MUKSIN ALATAS S.KM 197610042025211012 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
30	DANI RAMDHANI 198505242025211003 - V Operator Layanan Operasional Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota
31	ASEP SUDRAJAT 196902052000031001 Penata Muda Tingkat I - III/b Pengolah Data Dan Informasi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
32	TATANG SURYANA S.Sos. 197009022007011011 Penata Muda Tingkat I - III/b Analisis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
33	SHINTYA RIZKAYANI S.Psi 199601042022032014 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
34	DADANG GUNAWAN 198010102009011011 Pengatur Tingkat I - II/d Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota
35	BEBET ZAELANI SOLIHIN S.T. 198207092024211002 - IX Analisis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
36	HUDA IMAN AZHARI ST. 199303102024211004 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota
37	SANDI SUTISNA 19790730 201001 1 005 Pengatur Tingkat I - II/d Pengolah Data dan Informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian

38	GILANG FAJAR RAMADHAN S.KOM NON ASN Operator
39	Dadan Ramdani NON ASN Operator

ditetapkan di Soreang
Pada tanggal, 23 Mei 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

KATA PENGANTAR



Kabupaten Bandung yang memiliki kondisi geografis berupa dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana lainnya antara lain gempa bumi, gerakan tanah, longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan dan wabah penyakit lain seiring terjadinya bencana.

Penanganan penanggulangan bencana terdapat pada beberapa tahapan diantaranya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan kedaruratan pada saat kejadian dan penanganan penanggulangan pada paska bencana, hal ini sudah menjadi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Tugas pokok dan fungsi tersebut selain dari aspek teknis operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya tidak terlepas dari aspek perencanaan. BPBD untuk melaksanakan penyusunan Dokumen perencanaan yang mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan OPD, tahap penyusunan renja OPD, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan

tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Untuk mewujudkan *good governance*, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 bermaksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dengan dukungan sumber pembiayaan/anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Melalui Rencana Kerja ini, diharapkan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diselenggarakan secara optimal serta dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang membutuhkannya.

Soreang, 23 Juni 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung

Drs. H. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670914 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Awal.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2024.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD 2024.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja PD.....	35
2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi.....	37
2.4 Review terhadap RKPD.....	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	62
2.6 Capaian SPM Tahun 2024.....	62
2.7 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BPBD Tahun 2024.....	65
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	72
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	72
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD	72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	83
4.1. Target Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	102
4.2. Target Kinerja Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs).....	103
BAB V PENUTUP.....	106
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

BAB II	Halaman
Gambar 2.3.1 Profil Demografi Pegawai BPBD Tahun 2024.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2024.....	8
Tabel 2.1.2	Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024.....	10
Tabel 2.1.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung.....	11
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung.....	36
Tabel 2.3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD.....	38
Tabel 2.4.1	Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung.....	44
Tabel 2.6.1	Laporan Evaluasi Kinerja Penerapan SPM Tahun 2025.....	62
Tabel 2.7.1	Capaian dan Target SDG's TPB : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) Tahun 2024.....	67
Tabel 2.7.2	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDG's : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun).....	68
Tabel 2.7.3	Capaian dan Target SDG's TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025.....	69
Tabel 2.7.4	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDG's TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan).....	70
Tabel 3.1	Tabel, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BPBD.....	75
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Kerja Prubahan dan Pendanaan BPBD Tahun 2025 Kabupaten Bandung.....	88
Tabel 4.1.1	Target Kinerja Pelaksanaan SPM Tahun 2025-2030.....	102
Tabel 4.2.1	Indikator SDGs Pada BPBD Kab. Bandung.....	104
Tabel 4.2.2	Target SDG's TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) Tahun 2024.....	106
Tabel 4.2.3	Target TPB : Kota dan Komunikasi Berkelanjutan (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif Aman.	

Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025- 2030.....	107
---	-----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2025 telah di tetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2025, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk memberikan cerminan komitmen dalam membangun daerah yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk sinkronisasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu jalan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah untuk melakukan integrasi dan optimalisasi SDM serta sumber daya lain agar dapat menanggapi ketentuan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan 1 (satu) tahun guna menerjemahkan RKPD yang akan menjadi tolak ukur dasar perencanaan, implementasi, dan pemantauan perkembangan pembangunan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini juga merupakan visi misi dan program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan BPBD melakukan pemetaan dari Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.151.3604/2024 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak BPBD Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu - isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-4 (Keempat) yaitu **“4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”.**

Untuk mendukung misi tersebut diperlukan penyelarasan aspek komponen kebencanaan yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah. Hal ini didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Dengan melihat riwayat kebencanaan terdapat beberapa bencana yang cenderung tidak dapat dihindarkan dan dapat mengganggu stabilitas pembangunan secara langsung. Mitigasi bencana tidak dapat menghilangkan terjadinya bencana secara menyeluruh. Sehingga dibutuhkan upaya penanganan aspek kebencanaan yang diarahkan upaya adaptasi pada rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki prioritas terhadap antisipasi bencana.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dengan

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2025 serta terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanganan penanggulangan kebencanaan di wilayah Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dari penjabaran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
3. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai pedoman / arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rancangan Renja PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu



Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lain ya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung beserta target dan capaian realisasinya. Hasil sebagaimana tersebut diatas, dapat kami sampaikan dan jelaskan berdasarkan indikator kegiatan yang terdapat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	Target	Realisasi	Capaian (Persentase)
1	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0,56	0,68	121,42
			2. Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keterntaman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1 Nilai SAKIP	74	80,30	108,51
			2 Nilai IKM	78	89,87	115,22
			3. Pesentase BMD Kondisi Baik	90%	94,93	105,47

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

1. Evaluasi Program Tahun 2024

Anggaran BPBD pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. **15.199.355.456** (Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp. **14.373.885.174** (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus

Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau pencapaian **94,57%**, dengan rincian belanja sebagai berikut :

- a) Belanja Operasi** sebesar Rp. **13.985.936.506** (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **13.198.432.674** (Tiga Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau pencapaian **94,37%**;
- b) Belanja Modal** sebesar Rp. **1.213.418.950** (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. **1.175.452.500** (Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau pencapaian **96.87%**.

Adapun untuk anggaran realisasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.2
Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran Rp
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	10.988.739.813	10.408.167.949	94,72	580.571.864
		Persentase Aset BMD dalam kondisi baik				
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	4.210.615.643	3.965.717.225	94,18	244.898.418
Program 1			10.988.739.813	10.408.167.949	94,72	580.571.864
Program 2			4.210.615.643	3.965.717.225	94,18	244.898.418
Program 1 + 2			15.199.355.456	14.373.885.174	94,57	825.470.282

Pada Tabel diatas dievaluasi dalam bentuk realisasi anggaran. Selanjutnya, pada **Tabel T-C. 29** menjelaskan capaian akuntabilitas kinerja sebagai beriku

Tabel 2.1.3

Tabel T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026
Kabupaten Bandung

Nama PD : BPBD

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Nilai IKM BMD	Nilai Nilai Perse ntase	70 76 75	Nilai Nilai Perse ntase	75,45 80,04 99,9	Poin Poin Perse ntase	- 70 - 75 - 80	Poin Poin Perse ntase	-	-	Nilai Nilai Perse ntase	74 78 90	Nilai Nilai Perse ntase	-	- 108.51 - 115.22 - 105.71
										77,65	107.79				-	
										80,04	-				-	
										99,9	105.31				-	
											60,80				-	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Person	100	Person	100	Person	100	Person	100	100	Person	100	Person	300	300,00
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	100	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	100	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00
1.05.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	100	Dokumen	2	Dokumen	6	60,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	10	Dokumen	6	Dokumen	2	Dokumen	2	100	Dokumen	2	Dokumen	10	100,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	Persentase	100	100	Persentase	100	Persentase	300	300,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		yang tepat waktu														
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	108	Bulan	12	Bulan	14	Bulan	14	100	Orang / Bulan	27	Orang / Bulan	53	49,07
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	Dokumen	2	dokumen	5	dokumen	5	100	Laporan	3	Laporan	10	83,33

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Person	100	Person	100	Person	100	Person	100	100	Person	100	Person	300	300,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100	Stell	80	Stell	80	Stell	80	100	Paket	100	Paket	260	260,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Person	100	Person	70,16	Person	100	Person	80,4	80,4	Person	100	Person	180	180,40

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.05.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	Jenis	14	Jenis	13	Jenis	11	84,615 38462	Paket	15	Paket	40	66,67
1.05.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	Unit	11	Unit	8	Unit	8	100	Paket	8	Paket	27	67,50
1.05.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	25	Jenis	15	jenis	5	jenis	5	100	Paket	5	Paket	25	100,00
1.05.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	4	N/A	N/A	jenis	6	jenis	6	100	Paket	1	Paket	7	175,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Kantor yang Disediakan														
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30	Jenis	6	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Paket	6	Paket	12	40,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	20	Jenis	4	jenis	4	jenis	2	50	Dokumen	4	Dokumen	10	50,00
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	HOK	457	HOK	500	HOK	400	80	Laporan	1	Laporan	858	21.450,00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggara	Laporan	4	HOK	400	HOK	250	HOK	200	80	Laporan	1	Laporan	601	15.025,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Konsultasi SKPD	araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Person	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Person	100	Person	100,00
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Unit	1	Unit	#DIV/0!
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket	Unit	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Unit	1	Unit	#DIV/0!

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Mebel yang Disediakan														
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Person	100	Person	39,96	Person	100	Person	85,68	85,68	Person	100	Person	226	225,64
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	Buah	3525	Buah	4.500	Buah	4.889	108,644444	Laporan	1	Laporan	8.415	210.375,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	100	Laporan	1	Laporan	25	625,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	4	OB	1471	OB	1416	OB	1416	100	Laporan	1	Laporan	2.888	72.200,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Perse n	100	Perse n	47,13	Perse n	100	Perse n	55,55	55,55	Perse n	100	Perse n	203	202,68
1.05.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	70	Kali	125	Unit	14	Unit	11	78,57142857	Unit	14	Unit	150	214,29

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	115	kali	35	Unit	19	Unit	9	47,368 42105	Unit	23	Unit	67	58,26
1.05.01.2.09.02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Unit	1	-	1	25,00
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	Kali	9	Jenis	2	Jenis	2	100	Unit	2	Unit	13	130,00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Unit	25	Kali	19	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	-	0	Kali	19	76,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	5	Paket	1	Paket	1	Paket	1	100	Unit	1	Unit	3	60,00
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	300	300,00
1.05.03. 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	#####	Orang	667,569	Orang	386.272	Orang	386.272	100	Orang	750.000	Orang	1.136.940	37,28

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	Perse n	100	Perse n	100	Perse n	0	0	Dokumen	1	Dokumen	101	10.100,00
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka	Orang	3.050.000	Perse n	100	Perse n	100	Perse n	100	100	Orang	750.000	Orang	750.200	24,60

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya														
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	#####	Orang	269,522	Orang	356.146	Orang	356.146	100	Orang	700.000	Orang	1.056.416	37,07

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	480	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Orang	120	Orang	120	25,00
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4	Person	100	Person	100	Person	100	100	Dokumen	1	Dokumen	201	5.025,00	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Unit	3	Unit	3	25,00
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa tangguh bencana	Kawasan	4	Desa	3	Desa	2	Desa	2	100	N/A	N/A	Desa	5	125,00
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	600	Orang	100	Orang	150	Orang	150	100	Orang	150	Orang	400	66,67

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	800	Orang	200	Person	100	Person	100	100	Orang	200	Orang	500	62,50
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dokumen	1	Dokumen	0	#DIV/0!
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan	Orang	1.050.000	Orang	217,192	Orang	49.819	Orang	49.819	100	Orang	250.000	Orang	300.036	28,57

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan				
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
		atan dan Evakuasi Korban Bencana															
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Laporan	0	Laporan	0	#DIV/0!
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Dokumen	1	Dokumen	0	0,00

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat														
		- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Person	100	Person	100	Person	100	Person	100	100	Person	100	Person	300	300,00
1.05.03. 2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	400.000	Person	100	Person	100	Person	100	100	Orang	100.000	Orang	100.200	25,05

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	400.000	Jenis	5	Jenis	6	Jenis	6	100	Orang	100.000	Orang	100.011	25,00
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Laporan	0	-	0	#DIV/0!

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1.05.03. 2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Dokumen	0	-	0	#DIV/0!
		- Persentase penanganan bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Person	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALUE!	Person	0	-	0

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja PD Tahun (n-2)		Realisasi Renja PD Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan	Person	100	Person	100	Person	100	Person	100	100	Person	100	0	300	300,00
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitas	Dokumen	16	Orang	25000	Orang	304.817	Orang	304.817	100	Dokumen	4	Orang	329.821	2.061.381,25

[illegible]

Berdasarkan hasil evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat kewilayahan, daerah perbatasan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat;
- c. Belum optimalnya penyusunan dokumen peta rawan bencana di wilayah Kabupaten Bandung;
- d. Kurang terpenuhinya data dukung berkenaan dengan data potensi bencana perwilayah, rekapitulasi kejadian bencana yang disertai kerugian material dan non material;
- e. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran hal ini dikarenakan adanya refocusing Crosscutting;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang Ex Officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

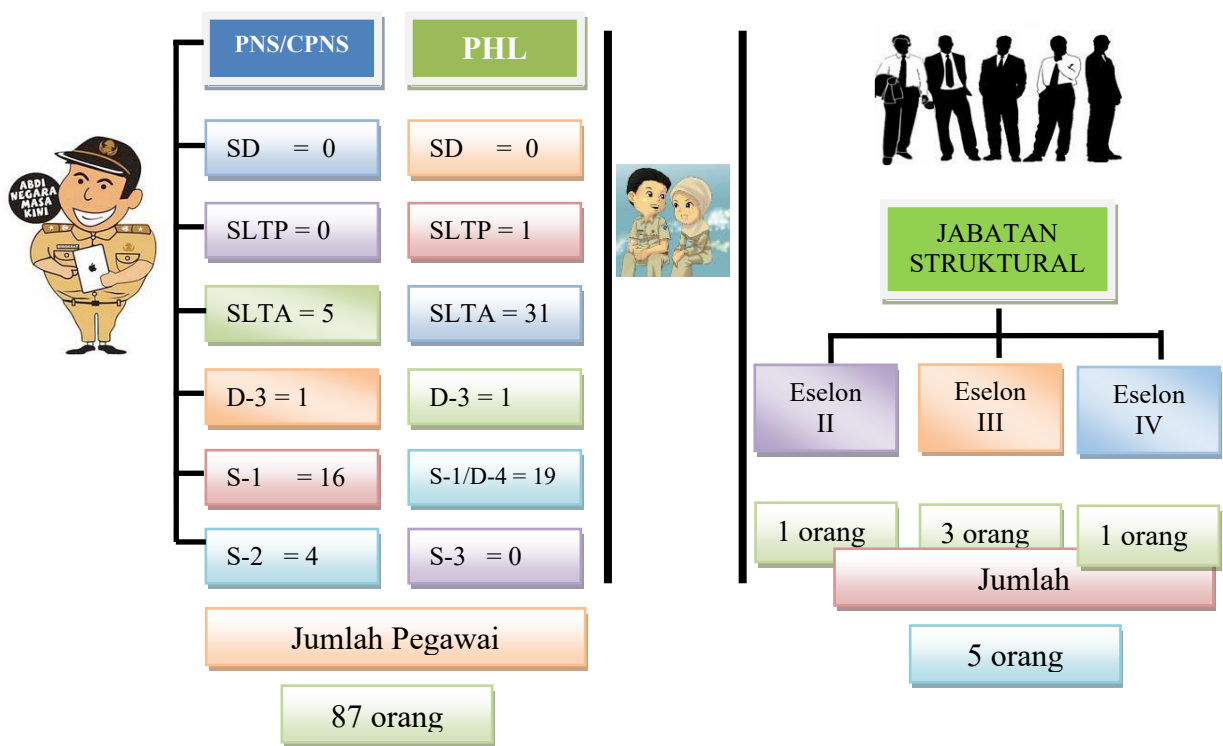
Tabel 2.2.1
T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung

NO	INDIKATOR	SPM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -			REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		Proyeksi		Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)		0.58	0.59	0.7	0.56	0.68	0.69	0.7	
	Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana	1. Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
		3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
2	Nilai IKM		78	79	80	83,43	89,87	0	0	
	Nilai SAKIP		74	75	76	77,60	80,30	80.4	80.5	
	Persentase BMD Kondisi Baik		90%	95%	100%	48,64	94,93	80%	80%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Tugas, Pokok dan Fungsi BPBD

Sejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.

Gambar 2.3.1
PROFIL
DEMOGRAFI PEGAWAI
BPBD TAHUN 2024



Dilihat dari **Gambar 2.3.1** Profil Demografi Pegawai diatas berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas.

Pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 22 %, Golongan III sebanyak 52% dan Golongan IV sebanyak 26%, melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD banyak ditempati oleh golongan II Dan III, dilain sisi BPBD memerlukan

tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini Jabatan Fungsional Umum (JFU) ataupun Jabatan Fungsional Teknis (JFT) dari PNS atau PPPK.

Di samping pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya sebagai berikut:

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat, membawahkan
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Analis Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah
 - c. Sub. Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Penata Penanggulangan Bencana
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penata Penanggulangan Bencana
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penata Penanggulangan Bencana

Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung adalah:

TABEL 2.3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Aspek Kajian	Capaian/kon disi saat ini	Standar yang digunaka n	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenanga n BPBD)	Eksternal (diluar kewenanga n BPBD)	
1. Sumber Daya Manusia	Implementasi rencana kerja BPBD belum optimal	Rasio Jumlah Personil dengan Pelayanan Publik di Bidang Kebencan aan	Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru	Kuota perekrutan Aparatur terbatas	kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dibidang Penanggulanga n Bencana
2. Sumber Daya Anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan Pendanaan/A nggaran Sektoral	Perda. APBD tentang Rasio Pagu Anggaran	Rancangan Kebutuhan Pagu Anggaran yang proporsiona	Regulasi/Ke bijakan Pagu Anggaran APBD	Belum optimalnya Pagu Anggaran Sektoral BPBD

Aspek Kajian	Capaian/kon disi saat ini	Standar yang digunaka n	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenanga n BPBD)	Eksternal (diluar kewenanga n BPBD)	
	BPBD	Kebencan aan sebesar 30 % dari Total APBD	1		
3. Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permenda gri No 7 Tahun (standaris asi sarana prasarana pemerinta h)	Belum lengkapnnya Rescue KIT	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Penanggulanga n Bencana
4. Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD), Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Rencana Kontijensi	Dokumen Perencana aan Untuk jangka waktu tertentu	Pembuatan RAD, PRB dan Rencana Kontijensi masih dalam proses	Perda/Perb up tentang RAD, PRB dan Rencana Kontijensi belum terbit	Belum optimalnya kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasi kan ke seluruh swilayah kecamatan	Dana/An ggaran	Keterbatasa n anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
6. Pengembangan partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana	Belum optimalnya pembentukan Unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat dan Forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB	Pencegah an/ Siaga dan Adaptasi	Terbatasnya ketersediaa n Anggaran dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam PB	Belum terbitnya Perda Penanggula ngan Bencana	Belum optimalnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikoordinir oleh BPBD dalam Penanggulanga n Bencana
7. Peningkatan/Pe ngoptimalan Koordinasi lintas SKPD terkait Penanggulangan Bencana dari Aspek Kewenangan/Tu	Belum Optimatnya Pelaksanaan kualitas Koordinasi Lintas SKPD terkait Penanggulan	Kegiatan Sosialisas i dan Rapat Kerja	Fungsi Komando /memimpin , mengkoordi nasikan dan mengendali kan tugas-	Persepsi dan Intepretasi SKPD terhadap Penanggual angan Bencana	Belum Optimalnya Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanggulanga n Bencana

Aspek Kajian	Capaian/kon disi saat ini	Standar yang digunaka n	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan BPBD
			Internal (kewenanga n BPBD)	Eksternal (diluar kewenanga n BPBD)	
poksi, Penganggaran, Program dan Kegiatan	gan Kebencanaan .		tugas di bidang penanggula ngan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana	belum sama dan sejalan.	baik lintas lembaga/intan si/SKPD, lintas program/kegia tan maupun Anggaran
8. Penanganan Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulan gan Bencana pada saat Pra, Saat dan Pasca Bencana.	SPM (Standar Pelayanan Minimal) Penangu ngan Kebencan aan	SPM/SOP dalam Proses	Regulasi/Ke bijakan SPM/SOP dari Pemerintah Pusat belum terbit	Belum adanya Pedoman/Acu an yang dilandasi dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
9. Kajian Resiko Becana (KRB)	Belum Optimalnya Kegiatan KRB	Dokumen Kajian	Kewenanga n dan Tupoksi	Anggaran dan SDM	Belum adanya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhter hadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabup aten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta
10. Sistem Penanganan Darurat Bencana	Terbentukny a Pusdalops dan Gis	SDM dan IPTEK	Tupoksi dan SDM	Peningkata n Anggaran untuk pengembng an SDM berupa Diklat/Bint ek	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi ketiga. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya

responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar PD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu:

- 1) Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.
- 2) Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.
- 3) Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung:

- 1) Perlu adanya kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur tentang alokasi dana kontinjensi dan dana siap pakai

dalam APBD karena keberadaannya telah diamanatkan dalam PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

- 2) Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
- 3) Perlu adanya sinkronisasi dalam membuat peraturan perundangan-undangan yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat.
- 4) Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif.

2.4 Review Terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMP dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung, BPBD yang baru terbentuk lima tahun membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat-alat evakuasi yang memiliki kualitas bagus dan sebuah manajemen gudang logistik yang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur BPBD yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh BPBD sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan BPBD harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi BPBD yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan BPBD harus melibatkan seluruh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Badan Keuangan Daerah (BKD) , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) , Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Pendidikan (DISDIK), Dinas Kebakaran (DISKAR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), SATPOL PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pertanian (DISTAN), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BADAN KESBANGPOL) seluruh kecamatan dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.

Pada Tahun Perencanaan 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan Program dan Kegiatan sebagaimana dapat dilihat dari tabel **T-C.31** berikut.

Tabel 2.4.1
TABEL T-C.31

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung

Nama PD : BPBD

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabup aten Bandu ng	Nilai IKM Nilai SAKIP	78 74	Rp 10,037,103, 000.00	X	X	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kabup aten Bandu ng	Nilai IKM Nilai SAKIP	78 74	Rp 10,798,918, 413.00
X	X	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase pemenuhan proses perencanaan	100 Perse n	Rp 70,000,000. 00	X	X	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase pemenuhan proses perencanaan	100 Perse n	Rp 70,000,000. 00
X	X	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doku men	Rp 20,000,000.0 0	X	X	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Doku men	Rp 20,000,000.0 0

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Doku men	Rp 20,000,000.00	X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Doku men	Rp 20,000,000.00
X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Doku men	Rp 5,000,000.00	X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Doku men	Rp 5,000,000.00
X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lapor an	Rp 25,000,000.00	X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lapor an	Rp 25,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keua ngan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjaw aban keuangan sesuai ketentuan	100 Perse n	Rp 9,293,357,6 61.00	X	X	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keua ngan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjaw aban keuangan sesuai ketentuan	100 Perse n	Rp 7,149,673,5 51.00
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang / Bulan	Rp 9,273,357,66 1.00	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang / Bulan	Rp 7,129,673,55 1.00
X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Lapo ran	Rp 20,000,000.0 0	X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Lapo ran	Rp 20,000,000.0 0
X	X	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu	100 Perse n	Rp 5,000,000.0 0	X	X	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu		Rp 5,000,000.0 0
X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penilaian Milik Daerah SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Lapo ran	Rp 5,000,000.00	X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penilaian Milik Daerah SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Lapo ran	Rp 5,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase Administrasi Kepegawaian	100 Perse n	Rp 49,800,000. 00	X	X	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase Administrasi Kepegawaian	100 Perse n	Rp 49,800,000. 00
X	X	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Rp 49,800,000.0 0	X	X	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Rp 48,800,000.0 0
X	X	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	100 Perse n	Rp 672,873,862 .00	X	X	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	100 Perse n	Rp 630,408,862 .00
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 19,800,000.0 0	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 19,800,000.0 0
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 248,805,362. 00	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Unit	Rp 248,805,362. 00
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Rp 0.00	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 45,000,000.00	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 45,000,000.00
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 20,160,000.00	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 20,160,000.00
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Doku men	Rp 5,000,000.00	X	X	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Doku men	Rp 5,000,000.00
X	X	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Lapo ran	Rp 0.00	X	X	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Lapo ran	Rp 0.00
X	X	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lapo ran	Rp 344,108,500.00	X	X	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Lapo ran	Rp 294,943,500.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 Perse n	Rp 29,668,800.00	X	X	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	100 Perse n	Rp 29,668,800.00
X	X	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00	X	X	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00
X	X	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00	X	X	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00
X	X	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Rp 29,668,800.00	X	X	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Rp 29,668,800.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00	X	X	0	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 0.00
X	X	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	100 Perse n	Rp 2,629,999,600.00	X	X	0	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabup aten Bandu ng	- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran	100 Perse n	Rp 2,822,285,030.00
X	X	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapo ran	Rp 10,000,000.00	X	X	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lapo ran	Rp 10,000,000.00
X	X	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapo ran	Rp 112,500,000.00	X	X	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapo ran	Rp 78,885,430.00
X	X	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapo ran	Rp 2,507,499,600.00	X	X	0	2.08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapo ran	Rp 2,733,399,600.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	- Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai	100 Perse n	Rp 949,844,000.00	X	X	0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bandung	- Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai	100 Perse n	Rp 231,903,570.00
X	X	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 0.00	X	X	0	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Rp 0.00
X	X	0	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Rp 275,694,000.00	X	X	0	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	Rp 168,321,970.00
X	X	0	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Rp 0.00	X	X	0	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Bandung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Rp 0.00
X	X	0	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 49,590,000.00	X	X	0	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Rp 63,581,600.00
X	X	0	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Rp 0.00	X	X	0	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
X	X	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 624,560,000.00	X	X	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bandung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Rp 0.00
					Jumlah Program 1				Rp 13,700,543,923.00						Jumlah Program 1				Rp 10,998,739,813.00
1	0	0			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kabupaten Bandung	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	100%	Rp 7,959,915,923.00	1	0	0			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kabupaten Bandung	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	100%	Rp 4,210,615,643.00
1	0	0	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500000 Orang	Rp 549,665,600.00	1	0	0	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	500000 Orang	Rp 904,816,232.00
1	0	0	2.01	0	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Rp 10,000,000.00	1	0	0	2.01	0	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	Rp 0.00
1	0	0	2.01	0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	500000 Orang	Rp 539,665,600.00	1	0	0	2.01	0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Bandung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	500000 Orang	Rp 904,816,232.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
							Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya										Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		
1	0	0	2.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabup aten Bandu ng	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2500 00 Orang	Rp 4,785,249,465.00	1	0	0	2.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabup aten Bandu ng	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2500 00 Orang	Rp 2,142,702,768.00
1	0	0	2.0	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 Doku men	Rp 8,600,000.00	1	0	0	2.0	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	0 Doku men	Rp 8,600,000.00
1	0	0	2.0	1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	3 Kawas an	Rp 300,000,000.00	1	0	0	2.0	1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 Kawas an	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
1	0	0	2.0	1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Doku men	Rp 2,190,189,65 0.00	1	0	0	2.0	1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Lapo ran	Rp 1,152,438,16 8.00
1	0	0	2.0	1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	3 Unit	Rp 269,760,950. 00	1	0	0	2.0	1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	0 Unit	Rp 0.00
1	0	0	2.0	1	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Doku men	Rp 7,600,000.00	1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Doku men	Rp 0.00
1	0	0	2.0	0	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupa ten Bandu ng	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegaha n dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	- 4 Kawas an	Rp 919,865,865. 00	1	0	0	2.0	0	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupa ten Bandu ng	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegaha n dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	- 4 Kawas an	Rp 595,799,000. 00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
1	0	0	2.0	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150 Orang	Rp 444,400,000.00	1	0	0	2.0	0	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	0 Orang	Rp 0.00
1	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Doku men	Rp 194,378,000.00	1	0	0	2.0	0	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Doku men	Rp 145,174,000.00
1	0	0	2.0	1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	Rp 245,754,000.00	1	0	0	2.0	1	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	Rp 85,194,600.00
1	0	0	2.0	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0 Doku men	Rp 204,701,000.00	1	0	0	2.0	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Doku men	Rp 155,497,000.00
1	0	0	2.0	1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluar ga	Rp 0.00	1	0	0	2.0	1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluar ga	Rp 0.00
1	0	0	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabup aten Bandu ng	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1700 00 Orang	Rp 1,625,122,450.00	1	0	0	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabup aten Bandu ng	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1700 00 Orang	Rp 824,560,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
1	0	0	2.0	0	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Lapo ran	Rp 5,243,000.00	1	0	0	2.0	0	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0 Lapo ran	Rp 0.00
1	0	0	2.0	0	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	- 1 Doku men - 100%	Rp 350,000,000.00	1	0	0	2.0	0	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	- 1 Doku men - 100%	Rp 319,565,600.00
1	0	0	2.0	0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10000 0 Orang	Rp 182,360,000.00	1	0	0	2.0	0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10000 0 Orang	Rp 83,440,000.00
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70000 Orang	Rp 1,069,959,450.00	1	0	0	2.0	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70000 Orang	Rp 417,654,400.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
1	0	0	2.0	1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Lapo ran	Rp 7,560,000.00	1	0	0	2.0	1	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Lapo ran	Rp 3,300,000.00
1	0	0	2.0	1	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupa ten Bandu ng	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	- 1 Doku men - 100%	Rp 10,000,000.0	1	0	0	2.0	0	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupa ten Bandu ng	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	- 0 Doku men - 0%	Rp 600,000.00
1	0	0	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabup aten Bandu ng	persentase lembaga kebencanaan/P D yang melaksanakan penyelenggaraa n penanggulangan kebencanaan	100%	Rp 999,878,408 .00	1	0	0	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabup aten Bandu ng	persentase lembaga kebencanaan/P D yang melaksanakan penyelenggaraa n penanggulangan kebencanaan	100%	Rp 338,536,643 .00
1	0	0	2.0	0	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Doku men	Rp 0.00	1	0	0	2.0	0	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Doku men	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
1	0	0	2.0	0	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Doku men	Rp 0.00	1	0	0	2.0	0	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Doku men	Rp 0.00
1	0	0	2.0	0	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Doku men	Rp 0.00	1	0	0	2.0	0	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Doku men	Rp 0.00
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Doku men	Rp 130,695,000.00	1	0	0	2.0	0	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Doku men	Rp 0.00
1	0	0	2.0	0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Lapo ran	Rp 0.00	1	0	0	2.0	0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Lapo ran	Rp 0.00
1	0	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0 Orang	Rp 0.00	1	0	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0 Orang	Rp 0.00
1	0	0	2.0	0	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam	100 Orang	Rp 107,663,200.00	1	0	0	2.0	0	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupa ten Bandu ng	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam	0 Orang	Rp 0.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
							menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)										menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)		
1	5	3	2.04	09	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	5 Kegiatan	Rp 107,663,200.00	1	5	3	2.04	09	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 Kegiatan	Rp 0.00
1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 Kegiatan	Rp 107,663,200.00	1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	5 Kegiatan	Rp 130,856,643.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
1	5	3	2.04	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0 Lembaga	Rp 0.00	1	5	3	2.04	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0 Lembaga	Rp 0.00
1	5	3	2.04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	Rp 128,161,708.00	1	5	3	2.04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kabupaten Bandung	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	Rp 6,830,000.00
1	5	3	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan	2 Dokumen	Rp 338,166,500.00	1	5	3	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana	Kabupaten Bandung	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan	2 Dokumen	Rp 200,000,000.00

Kode Rekening					Perancangan Awal RKPD					Kode Rekening					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Targe t Capai an	Pagu (Rp)
					Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun								Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		
					Jumlah Program 2				Rp 7,959,915,923.00						Jumlah Program 2				Rp 4,210,615,643.00
					Jumlah Program 1+2				Rp 21,660,459,846.00						Jumlah Program 1+2				Rp 15,199,355,456.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung berasaskan lima prinsip yaitu perencanaan politik, perencanaan teknokratik, perencanaan partisipatif, perencanaan top down, dan perencanaan bottom up. Musrenbang Kabupaten Bandung tahun 2024 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, perencanaan top down dan perencanaan bottomup yang dimulai dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Namun demikian sejak tahun anggaran 2017 pada kegiatan musrenbang kewilayahan (usulan bottom up), BPBD Kabupaten Bandung tidak termasuk OPD yang mengusung dan mengakomodir usulan musrenbang kewilayahan.

2.6 Capaian SPM tahun 2024

Selain melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan kinerja per sasaran, evaluasi juga dilakukan terhadap capaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat urusan bencana.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pelayanan SPM tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung beserta target kinerja, anggaran dan capaian realisasinya, dapat Kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.6.1

Laporan Evaluasi Kinerja Penerapan SPM Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	100
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	500	500	100
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	500	500	100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang	250	250	100
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0
Pelatihan Pencegahan an Mitigasi Bencana abupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Orang	0	0	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	200	200	100
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	3	3	100
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Keluarga maupun Petugas	Unit	0	0	0

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0	0	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	170	170	100
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	0	0	0
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	11	11	100
Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	46	46	100
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	28	28	100
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	0	0	0
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan	Persen	100	100	100

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja %
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	0	0	0
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	10	10	100
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	0	0	0
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2	2	100
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	0	0	0

2.7 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BPBD Tahun 2024

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs/TPB terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan dan target tersebut

menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030.

Pada tahun 2020, pemerintah pusat melalui Bappenas menerbitkan pedoman Penyusunan Teknis Penyusunan Rencana Aksi SDGs/TPB yang merespons perubahan yang terjadi dalam RPJMN 2020-2024 dan tantangan pandemi COVID-19. Pedoman ini juga dilengkapi dengan 4 (empat) buku metadata indikator SDGs/TPB Indonesia edisi II yang terdiri atas metadata pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Indonesia.

1. Kerangka Evaluasi Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung

Dalam melakukan evaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung, BPBD Kabupaten Bandung tidak melakukan evaluasi terhadap seluruh sasaran/indikator, melainkan merumuskan indikator prioritas yang disesuaikan dengan wewenang dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bandung. Indikator prioritas yang disesuaikan pada Penanggulangan Bencana terdapat pada **Pilar Lingkungan dan Pilar Tanpa Kemiskinan**.

2. Hasil Evaluasi Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung

Penjelasan mengenai hasil evaluasi capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung diuraikan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu tinjauan umum capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung, serta capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan Pilar Lingkungan.

3. Tinjauan Umum Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung

Penilaian dilakukan dengan membandingkan capaian Kabupaten Bandung dengan target nasional dan target provinsi Jawa Barat.

Evaluasi pada tahun 2020 memiliki kondisi yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena adanya pandemi COVID-19, yang berdampak terutama pada kinerja di sektor sosial dan ekonomi. Akibatnya beberapa indikator yang pada tahun 2019 telah tercapai, memiliki capaian yang berada di bawah target pada tahun 2020. Dengan demikian, penting untuk memerhatikan upaya

penanggulangan COVID-19 untuk memenuhi target capaian di masa depan.

Dari total indikator yang telah dan diprediksi akan tercapai, untuk indikator yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan, sebagian besar masih memerlukan pendataan lebih lanjut.

4. Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung

Dari tujuan yang menjadi bagian dari pilar lingkungan, hasil capaian tahun 2024 ialah Untuk pencapaian tujuan kota dan permukiman dan layak, indikator yang berkaitan masih perlu pendataan mendalam yang membagi korban bencana menjadi korban jiwa, korban hilang, korban terluka dan korban mengungsi. Adapun untuk BPBD berada di pilar sosial TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan (**Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun**) dan pilar Lingkungan TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan Kota Berkelanjutan (**Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan**).

Capaian, Target Realisasi beserta anggaran dapat disampaikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7.1

Capaian dan Target SDG’s TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun)
Tahun 2024

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Data 2021 (Baseline)	2024		
						Target	Capaian	Status
5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	–	Desa		0		
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	–					
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	–	Dokumen	1	3	3	Tercapai

Tabel 2.7.2

Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SDG’s TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun)

No	Indikator Metadata 1		Program (RKPD 2024)	Kegiatan (RKPD 2024)	Sub Kegiatan (RKPD 2024)	Anggaran (RKPD 2024)	Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	595,799,000	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/DINAS PENDIDIKAN
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontijensi	145.174.000		
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	8.600.000		

TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman.

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Data 2021	2024		
					(Baseline)	Target	Capaian	Status
5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Orang/	Korban Meninggal	Korban Meninggal	Korban Meninggal	
				100	-1	0	-19	
					Korban Hilang	Korban Hilang	Korban Hilang	
					0	0	0	
					Korban Terluka	Korban Terluka	Korban Terluka	
					0	0	-165	
					Korban Mengungsi	Korban Mengungsi	Korban Mengungsi	
					-657	0	-12,103	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).					117,13		
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.							

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Data 2021	2024		
					(Baseline)	Target	Capaian	Status
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Unit		6	6	Tercapai

Tabel 2.7.4

Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

SDG’s TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif.

Aman. Tangguh dan Berkelanjutan)

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Program (RKPD 2024)	Kegiatan (RKPD 2024)	Sub Kegiatan (RKPD 2024)	Anggaran (RKPD 2024)	Sumber Pembiayaan
5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Orang/ 100.000	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0	
							Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	319,565,600	
							Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	83,440,000	
							Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	417,654,400	APBD
							Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3,300,000	
							Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	600,000	

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Program (RKPD 2024)	Kegiatan (RKPD 2024)	Sub Kegiatan (RKPD 2024)	Anggaran (RKPD 2024)	Sumber Pembiayaan
	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0.00	APBD
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.			Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	0	APBD
	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		Unit	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,152,438,168	APBD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional pada dokumen RPJMN salah satunya Prioritas Ke-6 yaitu tentang **“Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”** diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat 9 prioritas dimana prioritas nomor lima berbunyi **“Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Mengantisipasi Risiko Perubahan Iklim”**, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Prioritas ke-6 yaitu **“Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana”**. Sedangkan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung masuk dalam misi keempat yaitu **“Meningkatnya kualitas infrastruktur yang integrasi dan berwawasan lingkungan”**. Untuk mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran BPBD, disusunlah empat strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung yaitu:

1. Penataan wilayah berbasis mitigasi bencana dan kebakaran;
2. Penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten/Kota;
3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur negara dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Penyediaan logistik, dan kebutuhan dasar untuk penyintas
5. Pengadaan sistem peringatan dini;
6. Penguatan cadangan pangan, simpul pangan desa dan regional untuk antisipasi bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2026

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-

hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.



BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Visi-Misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas.”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-4 (Keempat) yaitu:

“4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”.

Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas public agar memiliki kepentingan terhadap bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, kewenangan, tugas pokok dan

fungsi (**Core business**) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dalam rangka mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD (Misi Keempat), dalam program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Terwujudnya Wilayah Kabupaten Bandung yang Tangguh Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat yang Berkelanjutan dan Kolaborasi Multipihak Secara Terpadu Untuk Penanggulangan Bencana

SASARAN

1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentrman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi Bupati Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Berikut turunan Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijelaskan melalui indikator (output) pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tabel Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BPBD

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Maturitas Perangkat Daerah			
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
3	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
6	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu		
8	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
9	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
10	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
11	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
12	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu		
13	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
14	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
15	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
16	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		
17	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
18	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
19	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
20	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
21	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
22	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
23	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
24	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
25	Meningkatnya akuntabilitas	Tersedianya Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase BMD Kondisi Baik	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	pemerintah daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
26	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
27	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
28	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
29	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
30	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
31	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
32	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
33	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
34	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya laporan BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
35	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
36	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
37	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	
38	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	
39	Meningkatnya	Terlaksananya Pemeliharaan	Pemeliharaan Peralatan dan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	akuntabilitas pemerintah daerah	Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya			yang Dipelihara	
40	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
41	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
42	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana			
43	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya Informasi rawan bencana yang diberikan kepada Warga Negara	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
44	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	
45	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	
46	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam upaya mengurangi dampak bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
47	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
48	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
49	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah	Penyusunan Rencana Kontijensi			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	
50	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	
51	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	
52	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
53	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	
54	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	
55	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	
56	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	
57	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
58	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara optimal	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
59	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	
60	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	
61	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
62	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	
63	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	
64	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
65	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	
66	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
67	Meningkatnya kapasitas daerah dan	Terlaksananya lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan			an penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan		
68	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	
69	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	
70	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	
71	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	
72	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
73	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	
74	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	
75	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator			Ket.
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
76	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	
77	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha alam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	
78	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	
79	Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, maka BPBD perlu melakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD BPBD dalam penyusunan rencana kerja

Prioritas pembangunan PD BPBD Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah khususnya dibidang penanggulangan bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengananganan segera.

Hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik dibidang Penanggulangan Bencana
2. Optimalisasi Pagu Anggaran Sektoral BPBD yang rasional dan proporsional
3. Peningkatan kualitas/kuantitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
4. Peningkatan kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. Pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah, jenis bencana dan dampak bencana
6. Kemandirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha didalam upaya pencegahan/ kesiapsiagaan (Pra bencana) serta adaptasi terhadap bencana
7. Peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan baik lintas lembaga/intansi/PD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran
8. Terbitnya regulasi/kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPM/SOP siklus penanggulangan kebencanaan (pra, saat dan pasca bencana).
9. Terdapatnya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta

10. Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung.

Prioritas Sebagaimana diatas dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Serta dalam rangka peningkatan Standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang terdiri dari :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dalam rangka menunjang program/kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tersebut, maka BPBD Kabupaten Bandung dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh anggaran program operasional dengan melakukan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;*
- 2) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;*
- 3) *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;*
- 4) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.*

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*
- 2) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.*

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.*

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

1. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.*
2. *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
3. *Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;*
- 2) *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;*
- 3) *Penyediaan peralatan rumah tangga;*
- 4) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor;*
- 5) *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;;*
- 6) *Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan*
- 7) *Fasilitasi Kunjungan Tamu;*
- 8) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*
- 2) *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
- 3) *Pengadaan Mebel;*
- 4) *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.*

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

1. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat;*
2. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
3. *Penyediaan Jasa Pelayanan.*

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;*

- 2) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;*
- 3) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar*
- 4) *Pemeliharaan Mebel;*
- 5) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
- 6) *Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;*
- 7) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

9. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota;*
- 2) *Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana).*

10. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;*
- 2) *Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota;*
- 3) *Penyusunan Rencana Kontijensi;*
- 4) *Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;*
- 5) *Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;*
- 6) *Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;*
- 7) *Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota;*
- 8) *Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota;*
- 9) *Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota;*
- 10) *Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota;*
- 11) *Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.*

11. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** Sebagai berikut :

- 1) *Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;*
- 2) *Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota;*
- 3) *Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota;*

- 4) *Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota;*
- 5) *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;*
- 6) *Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;*
- 7) *Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit;*
- 8) *Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.*

12. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini diimplementasikan kedalam **Sub Kegiatan** sebagai berikut :

- 1) *Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
- 2) *Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;*
- 3) *Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
- 4) *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;*
- 5) *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;*
- 6) *Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;*
- 7) *Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota;*
- 8) *Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota;*
- 9) *Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;*
- 10) *Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota;*
- 11) *Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota;*
- 12) *Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota.*

Tahun Perencanaan 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan 2 Program dengan Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 12,592,326,372.00 dan Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp 4,549,827,252.00 dengan total sebesar Rp 17,142,153,624.00 serta melaksanakan 11 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan

Penjelasan rencana kerja dan pendanaan BPBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan pada **Tabel 4.1:**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan BPBD Tahun 2025
Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
A.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraa n urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	x	x	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase BMD Kondisi Baik	BPBD Kabupaten Bandung	1. 83,5; 2. 77,70; 3. 90	Rp 12,592,326,372.00	APBD	
A.1		x	x	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	BPBD Kabupaten Bandung	100 Persen	Rp 50,999,949.00	APBD	
A.1.1		x	x	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	6 Dokumen	Rp 8,469,949.00	APBD	
A.1.2		x	x	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 20,830,000.00	APBD	
A.1.3		x	x	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp 3,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
A.1.4		x	x x	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	5 Laporan	Rp	18,700,000.00	APBD	
A.2		x	x x	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	
A.2.1		x	x x	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	0 Data	Rp	-	APBD	
A.2.2		x	x x	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	BPBD Kabupaten Bandung	100 Persen	Rp	8,942,827,367.00	APBD	
A.3		x	x x	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Kabupaten Bandung	27 Orang/ Bulan	Rp	8,906,690,220.00	APBD	
A.3.1		x	x x	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	3 Laporan	Rp	36,137,147.00	APBD	
A.4		x	x x	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu	BPBD Kabupaten Bandung	100 Persen	Rp	4,960,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
A.4.1		x	xx	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	5 Laporan	Rp	4,960,000.00	APBD	
A.4.2		x	xx	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	BPBD Kabupaten Bandung	100 Persen	Rp	50,000,000.00	APBD	
A.4.3		x	xx	1	2.05	7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BPBD Kabupaten Bandung	100 Paket	Rp	50,000,000.00	APBD	
A.5		x	xx	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp	-	APBD	
A.5.1		x	xx	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp	-	APBD	
A.5.2		x	xx	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	BPBD Kabupaten Bandung	100 Persen	Rp	290,878,500.00	APBD	
A.5.3		x	xx	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	15 Paket	Rp	10,000,000.00	APBD	
A.5.4		x	xx	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	8 Paket	Rp	105,366,500.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
A.5.5		x	xx	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Paket	Rp	-	APBD	
A.5.6		x	xx	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	1 Paket	Rp	25,000,000.00	APBD	
A.5.7		x	xx	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	6 Paket	Rp	20,000,000.00	APBD	
A.5.8		x	xx	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	4 Dokumen	Rp	4,998,500.00	APBD	
A.6		x	xx	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPBD Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp	-	APBD	
A.6.1		x	xx	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp	125,513,500.00	APBD	
A.6.2		x	xx	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	100 Persen	Rp	-	APBD	
A.6.3		x	xx	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	
A.6.4		x	xx	2	2.08	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
A.7		x	xx	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	
A.7.1		x	xx	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	
A.7.2		x	xx	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD Kabupaten Bandung	100 Persen	Rp	2,870,570,656.00	APBD	
A.7.3		x	xx	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp	3,500,000.00	APBD	
A.8		x	xx	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp	144,000,000.00	APBD	
A.8.1		x	xx	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BPBD Kabupaten Bandung	12 Laporan	Rp	2,723,070,656.00	APBD	
A.8.2		x	xx	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	BPBD Kabupaten Bandung	100 Persen	Rp	382,089,900.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
A.8.3		x	xx	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	
A.8.4		x	xx	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung	37 Unit	Rp	129,189,800.00	APBD	
A.8.5		x	xx	2	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	
A.8.6		x	xx	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	
A.8.7		x	xx	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	2 Unit	Rp	53,030,000.00	APBD	
		x	xx	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	BPBD Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	
B.		x	xx	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Kabupaten Bandung	1 Unit	Rp	199,870,100.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
B.1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1	5	3			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	100%	Rp	4,549,827,252.00	APBD	
B.1.1		1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kabupaten Bandung	500000 Orang	Rp	535,353,200.00	APBD	
B.1.2		1	5	3	2.01	3	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp	306,190,000.00	APBD	
B.2		1	5	3	2.01	4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kabupaten Bandung	500000 Orang	Rp	229,163,200.00	APBD	
B.2.1		1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kabupaten Bandung	250000 Orang	Rp	2,141,333,902.00	APBD	
B.2.2		1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah	Kabupaten Bandung	4 Kawasan	Rp	453,359,200.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
B.2.3		1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp	-	APBD	
B.2.4		1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	Rp	295,710,600.00	APBD	
B.2.5		1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kabupaten Bandung	200 Orang	Rp	250,136,452.00	APBD	
B.2.6		1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp	3,310,000.00	APBD	
B.2.8		1	5	4	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Bandung	0 Keluarga	Rp	-	APBD	
B.2.9		1	5	4	2.02	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	Rp	52,715,300.00	APBD	
B.2.10		1	5	4	2.02	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
B.2.1 1		1	5	4	2.02	1 5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kabupaten Bandung	0 Unit	Rp	-	APBD	
B.2.1 2		1	5	4	2.02	1 6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kabupaten Bandung	2 Kawasan	Rp	399,050,100.00	APBD	
B.3		1	5	4	2.02	1 7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp	687,052,250.00	APBD	
B.3.1		1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Bandung	170000 Orang	Rp	1,364,154,350.00	APBD	
B.3.2		1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp	10,000,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
B.3.3		1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	- SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	Kabupaten Bandung	- 1 Dokumen - 100%	Rp	338,910,600.00	APBD	
B.3.4		1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kabupaten Bandung	100000 Orang	Rp	72,736,000.00	APBD	
B.3.5		1	5	3	2.03	7	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	
B.3.6		1	5	3	2.03	8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kabupaten Bandung	50 Orang	Rp	96,198,700.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
B.3.7		1	5	3	2.03	9	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten Bandung	70000 Orang	Rp	839,459,050.00	APBD	
B.3.8		1	5	3	2.03	10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	
B.4		1	5	3	2.03	11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Bandung	1 Laporan	Rp	6,850,000.00	APBD	
B.4.1		1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan	Kabupaten Bandung	100%	Rp	508,985,800.00	APBD	
B.4.2		1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	Rp	1,186,800.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
B.4.3		1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	
B.4.4		1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	
B.4.5		1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	
B.4.6		1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp	-	APBD	
B.4.7		1	5	3	2.04	7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp	-	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
B.4.8		1	5	3	2.04	8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kabupaten Bandung	0 Orang	Rp	-	APBD	
B.4.9		1	5	3	2.04	9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	
B.4.10		1	5	3	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kabupaten Bandung	5 Kegiatan	Rp	507,799,000.00	APBD	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana
B.4.1 1		1	5	3	2.04	1 1	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Kabupaten Bandung	0 Lembaga	Rp	-	APBD	
B.4.1 2		1	5	3	2.04	1 2	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Kabupaten Bandung	0 Laporan	Rp	-	APBD	
B.4.1 3		1	5	3	2.04	1 3	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	Rp	-	APBD	
								Jumlah Program 1+2				Rp 17,142,153,624.00		

4.1. Target Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu ketentuan perundang-undangan yang mengikat BPBD sebagai badan pemerintahan yang memberikan pelayanan berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam pelayanan dasar ini BPBD menjadi bagian dari sub urusan bencana.

Adapun untuk target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dapat Kami sampaikan targetnya sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Target Kinerja Pelaksanaan SPM Tahun 2025-2030

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang terdampak bencana	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang
1.a.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1.b.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
1.c.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana			140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang	140.373 Orang
1.d.	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana			6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Warga Negara terdampak bencana	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	18.679 Orang	18.679 Orang	18.679 Orang	18.679 Orang	18.679 Orang
2.a.	Sarana prasarana penanggulangan bencana			17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Indikator Pencapaian (Jumlah Warga)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
2.b.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)			3.736 Orang	3.736 Orang	3.736 Orang	3.736 Orang	3.736 Orang
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara terdampak bencana	Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang
3.a.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana			1	1	1	1	1
3.b.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana			5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang
3.c.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana			100%	100%	100%	100%	100%
3.d.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas			100%	100%	100%	100%	100%
3.e.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana			5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang	5.598 Orang

4.2. Target Kinerja Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)

Dalam Pelaksana program dan kegiatan BPBD Kabupaten Bandung pun turut serta dan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Bandung, adapun indikator SDGs yang dilaksakan oleh BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.1
Indikator SDGs Pada BPBD Kab. Bandung

NO.	Tujuan	Target	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jiwa	0	0	0	0	0	0	
			Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana	Kawasan/ Destana/ Kelana	2	2	2	2	2	2	
			Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial								
			Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Poin	116	115	114	113	112	111	
			Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Nilai	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
2	Menjadikan Kota dan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Poin	116	115	114	113	112	111	

NO.	Tujuan	Target	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	jumlah kematian dan	Jumlah sistem peringatan dini	Unit	2	2	2	2	2	2	
		jumlah orang terdampak,	cuaca dan iklim serta								
		dan secara substansial	kebencanaan.								
		mengurangi kerugian	Jumlah kerugian ekonomi	Nilai	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		ekonomi relatif terhadap	langsung akibat bencana.								
		PDB global yang	Dokumen strategi pengurangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
		disebabkan oleh bencana,	risiko bencana (PRB) tingkat								
		dengan fokus melindungi	daerah.								
		orang miskin dan orang-									
		orang dalam situasi									
		rentan.									
3	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	

Tabel 4.2.2

Target SDG’s TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun)
Tahun 2024

No	Indikator Metadata 1		Indikator Proxy	Satuan Data Target	Data 2024 (Baseline)	2025			2026			2027			2028			2029			2030		
						Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status	Target	Capaian	Status
5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	–	Desa		2			2			2			2			2			2		
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	–																				
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	–	Dokumen	1	4			5			6			7			8			9		

Tabel 4.2.3

Target TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan (Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif.

Aman, Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025-2030

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung maupun OPD yang membidangi urusan lain.

Rencana Kerja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (**stakeholders**) dalam menciptakan **Good Governance** sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Bandung selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Bandung selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Bandung juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2025. Adapun fungsi dari Renja tahun anggaran 2025 ini sebagai

tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja pada tahun anggaran 2024 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Perubahan BPBD tahun 2025 kami susun sebagai bahan acuan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

UKA SUSKA PUJI UTAMA

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA